

Jurnal Administro

(Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara)

URL: <https://ejournalfish.unima.ac.id/index.php/administro/id/index>

Optimalisasi Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Kabupaten Minahasa

Jesika G.N. Moningka^{1*}, Sisca B. Kairupan², Devie S. R. Siwij,³

Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

¹ jesikamoningka@gmail.com *; ² siscabkairupan06@unima.ac.id; ³ deviesiwij@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:
Empowerment
People with
Disabilities
Social Service
Public Management
Minahasa Regency.

ABSTRACT

People with disabilities are an integral part of society that has equal rights to obtain social welfare. However, reality in the field often shows a gap between regulation and implementation of public services. This research aims to analyze the empowerment program for people with disabilities carried out by the Minahasa Regency Social Service. Using descriptive qualitative research methods, data was collected through in-depth interviews with four key informants, including the head of service, secretary, employees, and people with disabilities. The research results show that the role of Social Services varies based on four main indicators: facilitative, educational, representative, and technical. The role of education is considered optimal thanks to the cooperation with third-party organizations such as PPDI. However, the facilitative and representative role is still not optimal due to uneven data collection constraints and lack of funding cooperation with external parties. The technical role has tried to maximize in data collection despite being constrained by population administration.

INTISARI

Kata kunci:
Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas
Dinas Sosial
Manajemen Publik
Kabupaten Minahasa.

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak setara untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, termasuk kepala dinas, sekretaris, pegawai, dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial bervariasi berdasarkan empat indikator utama: fasilitatif, edukasi, representasional, dan teknis. Peran edukasi dinilai sudah optimal berkat kerjasama dengan organisasi pihak ketiga seperti PPDI. Namun, peran fasilitatif dan representasional masih belum optimal akibat kendala pendataan yang tidak merata dan minimnya kerjasama pendanaan dengan pihak luar. Peran teknis telah berupaya maksimal dalam pendataan meski terkendala administrasi kependudukan

Copyright © 2026 (Jesika G.N. Moningka). All Right Reserved

I. Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lainnya. Hak ini telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 [1] yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selain jaminan konstitusional, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 [2] Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama.

Istilah disabilitas diberikan kepada seseorang yang memiliki kekurangan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Menurut World Health Organization (WHO) [3] dalam World Report on Disability, penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami masalah kesehatan yang dapat berakibat terhambatnya aktivitas dan menimbulkan masalah sosial berkesinambungan, seperti kesulitan mengakses hal-hal penting dalam kehidupan yang mudah dilakukan oleh orang tanpa disabilitas. Pergeseran paradigma dari model medis yang melihat disabilitas sebagai kekurangan individu, menuju model sosial yang melihat hambatan sebagai hasil dari lingkungan yang tidak inklusif, menuntut pemerintah untuk berperan lebih aktif dalam menghilangkan barrier tersebut.

Meskipun telah ada jaminan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 [4] tentang Ketenagakerjaan dan ratifikasi konvensi internasional United Nation Convention of the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD) [5], penyandang disabilitas sering kali masih menjadi kaum minoritas yang terpinggirkan. Mereka masih menghadapi hambatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menikmati fasilitas umum, transportasi, pendidikan, dan pekerjaan. Banyak penyandang disabilitas masih menyandang masalah kesejahteraan sosial, berasal dari keluarga tidak mampu, bahkan terlantar. Kondisi ini menuntut adanya pemberdayaan dari pemerintah agar mereka mampu menggali potensi yang ada pada dirinya untuk hidup mandiri. Stigma negatif di masyarakat yang menganggap disabilitas sebagai beban keluarga masih menjadi tantangan besar yang menghambat integrasi sosial mereka.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial, memegang peranan vital dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Kairupan dan Siwij [6], optimalisasi peran dinas sosial sangat bergantung pada kemampuan instansi dalam merespons kebutuhan kelompok rentan secara inklusif dan terukur. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha terencana yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia serta mengatasi masalah sosial. Dalam konteks Kabupaten Minahasa, data Dinas Sosial menyebutkan terdapat 1.715 jiwa penyandang disabilitas pada tahun 2023. Mayoritas dari mereka menggantungkan hidupnya pada pekerjaan yang tidak layak, seperti pengemis eks-kusta atau penjual kaki lima. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk mengevaluasi bagaimana program pemberdayaan dijalankan oleh instansi terkait. Angka tersebut hanyalah data tercatat, sedangkan realitas di lapangan mungkin menunjukkan angka yang lebih tinggi akibat banyak penyandang disabilitas yang belum terdata secara administratif.

Kondisi ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan memperparah kerentanan mereka. Tanpa intervensi pemerintah yang tepat, siklus kemiskinan dan ketergantungan akan terus berlanjut. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan sosial konsumtif, melainkan membangun kapasitas individu agar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Namun, efektivitas program pemberdayaan sering kali terkendala oleh birokrasi, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar instansi. Tumbel [7] menegaskan bahwa rigiditas dan hambatan birokrasi sering kali menjadi bottleneck utama dalam implementasi kebijakan publik yang inklusif di tingkat daerah. Dinas Sosial sebagai ujung tombak pelayanan sosial di daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi sesuai dengan mandat undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis terkait Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat program tersebut. Evaluasi terhadap peran dinas sosial menjadi krusial untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang ada secara alamiah di lapangan, bukan dalam kondisi terkendali.

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial termasuk pemberdayaan disabilitas di wilayah tersebut. Sumber data menggunakan metode primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan

Huberman [8]. Keabsahan data diuji melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam memberdayakan penyandang disabilitas dianalisis menggunakan empat indikator utama: Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional, dan Peran Teknis. Bagian ini akan membahas secara mendalam temuan lapangan serta implikasinya terhadap teori pemberdayaan.

1. Peran Fasilitatif: Antara Bantuan dan Kendala Administratif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan dalam bentuk memfasilitasi penyandang disabilitas sebagai dukungan nyata bahwa tidak ada ketimpangan hak. Fasilitas yang diberikan beragam, mulai dari program khusus hingga pembangunan fasilitas publik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, peran fasilitator dijalankan dengan mengajukan dan mengadakan bantuan yang diinginkan oleh penyandang disabilitas. Contohnya, jika penyandang disabilitas membutuhkan kaki palsu, Dinas Sosial membantu mendatangkan tukang ukur dan biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan peran ini belum dapat dikatakan optimal secara keseluruhan. Selain itu, syarat administrasi menjadi hambatan signifikan. Banyak keluarga penyandang disabilitas yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), padahal syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos) harus ada NIK. Kondisi rumah yang belum memenuhi standar (masih tanah) juga menjadi kendala dalam verifikasi data. Dampaknya, banyak penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan sosial, pelatihan, atau pemberdayaan karena tidak terdata dengan jelas. Seorang orang tua penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa mereka belum pernah menerima bantuan beras sekalipun karena kendala administrasi KK. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan inklusif dan implementasi birokrasi. Dalam teori manajemen publik, efisiensi layanan sering terhambat oleh rigiditas aturan administratif. Meskipun Dinas Sosial ingin memfasilitasi, sistem basis data kependudukan yang menjadi pintu bantuan sosial menciptakan eksklusi bagi mereka yang paling rentan (keluarga miskin yang tidak memiliki administrasi lengkap). Hal ini sejalan dengan temuan Rizqia dan Purnaweni [9] bahwa pemberdayaan sering terhambat oleh ketidaksesuaian data sasaran.

2. Peran Edukasi: Optimalisasi Melalui Kemitraan

Peran edukasi sangat dibutuhkan bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk mencari informasi dan pengetahuan. Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dinilai telah menjalankan peran ini dengan baik dan optimal. Edukasi dilakukan melalui sosialisasi program dan kegiatan. Dinas Sosial turun langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk mensosialisasikan program pemberdayaan. Selain itu, terdapat kerjasama strategis dengan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia). Kerjasama ini memungkinkan sosialisasi kegiatan atau pelatihan dilakukan dengan lebih menyeluruh. Sosialisasi ini tidak hanya berupa informasi program, tetapi juga motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Banyak penyandang disabilitas merasa minder akibat keterbatasan atau kurang dukungan keluarga. Melalui ajang pelatihan yang disosialisasikan, mereka diharapkan memiliki bakat dan skill yang bisa menjadi nilai tambah bagi kehidupan mereka. Meskipun demikian, tantangan tetap ada karena jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit membuat sosialisasi belum bisa menjangkau 100% sasaran secara efisien. Namun, secara umum indikator peran edukasi telah berjalan optimal. Keberhasilan peran edukasi ini didukung oleh pendekatan community-based rehabilitation melalui kolaborasi dengan PPDI. Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam sosialisasi meningkatkan kepercayaan penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tahap penyadaran dalam teori pemberdayaan Wrihatnolo dan Riant [10], di mana pemahaman potensi diri adalah langkah awal kemandirian. Namun, edukasi harus terus diperluas tidak hanya kepada penyandang disabilitas, tetapi juga masyarakat umum untuk mengurangi stigma.

3. Peran Representasional: Keterbatasan Inovasi dan Pendanaan

Peran representasional ialah melakukan interaksi dengan pihak luar bagi kepentingan masyarakat dan memberi manfaat. Hal ini mencakup kerjasama dengan badan dan instansi lainnya demi mewujudkan visi misi, termasuk dalam hal pendanaan dan inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran representasional Dinas Sosial Kabupaten Minahasa masih belum optimal secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Ketiadaan bantuan pendanaan dari pihak luar, seperti donasi atau kerjasama korporasi (Corporate Social Responsibility), membebani anggaran daerah. Padahal kerjasama tersebut dapat berupa bantuan sosial seperti dana yang nantinya dapat membantu menyejahterakan penyandang disabilitas. Selain itu, terkait inovasi program, Dinas Sosial mengaku belum memiliki gebrakan baru karena posisi Kasi Penyandang Disabilitas yang sempat kosong menyebabkan kegiatan mandek. Saat ini, fokus utama adalah mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada (seperti pelatihan) daripada menciptakan inovasi baru. Hal ini membatasi potensi pemberdayaan yang bisa dicapai jika ada kolaborasi lebih luas dengan sektor swasta atau LSM lainnya. Ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membatasi skalabilitas program. Dalam manajemen publik modern, kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat (Pentahelix) sangat dianjurkan untuk keberlanjutan program sosial. Minimnya inovasi juga menunjukkan risiko stagnasi pelayanan. Jika program hanya bersifat rutinitas tanpa inovasi yang menyesuaikan kebutuhan zaman (misalnya pelatihan digital untuk disabilitas), maka tujuan kemandirian ekonomi akan sulit tercapai.

4. Peran Teknis: Upaya Pendataan di Tengah Hambatan Lapangan

Peran teknis berkaitan dengan hal-hal teknis dalam membantu proses pengembangan masyarakat, seperti pendataan yang cermat dan pelayanan administratif. Dinas Sosial telah melakukan segala cara demi mengoptimalkan peran teknis ini. Pendataan dilakukan secara rutin setiap tahun, biasanya pada bulan Januari sampai Februari. Metode pendataan bervariasi, mulai dari terjun langsung ke rumah, datang ke kantor, hingga melalui RT/RW. Selain pendataan, peran teknis juga terlihat dalam fasilitas pelayanan administrasi. Penyandang disabilitas yang memiliki surat dari PPDI tidak perlu mengantri saat mengurus surat administrasi di kantor pemerintahan (seperti Disdukcapil), karena KTP penyandang disabilitas memiliki bentuk berbeda yang memprioritaskan pelayanan. Namun, implementasi ini masih terkendala di lapangan. Beberapa penyandang disabilitas mengeluhkan sulitnya mengurus KK karena tidak memiliki kendaraan untuk menuju kantor dinas dan kurangnya respon dari tingkat RT/RW. Meskipun belum terlaksana dengan merata, Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tetap mengusahakan agar pendataan tersebut dapat terlaksana dengan menyeluruh dan akurat. Peran teknis menunjukkan komitmen birokrasi untuk melayani, namun hambatan infrastruktur (transportasi) dan koordinasi tingkat bawah (RT/RW) menjadi bottleneck. Akurasi data adalah fondasi dari kebijakan publik yang tepat sasaran. Tanpa data teknis yang valid, alokasi sumber daya akan menjadi tidak efisien. Upaya prioritas pelayanan administrasi adalah langkah positif yang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 [2] tentang hak atas pelayanan publik yang mudah dan cepat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai Peran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif: Belum optimal. Masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdata secara jelas sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial, pelatihan, ataupun pemberdayaan. Kendala administrasi (NIK/KK) menjadi penghambat utama.
2. Peran Edukasi: Berjalan dengan baik dan optimal. Segala bentuk edukasi sudah dilakukan, termasuk kerjasama dengan PPDI untuk melakukan sosialisasi kegiatan atau pelatihan dengan menyeluruh.
3. Peran Representasional: Belum optimal secara keseluruhan. Masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, padahal kerjasama tersebut dapat berupa bantuan sosial seperti dana yang nantinya dapat membantu menyejahterakan penyandang disabilitas itu sendiri.
4. Peran Teknis: Telah melakukan segala cara demi mengoptimalkan hal tersebut, seperti pendataan. Meskipun belum terlaksana dengan merata karena kendala mobilitas dan administrasi, Dinas Sosial tetap mengusahakan agar pendataan tersebut dapat terlaksana dengan menyeluruh dan akurat.

Referensi

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- [3] World Health Organization. (2011). *World Report on Disability*. Geneva: WHO.
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- [5] United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*. New York: United Nations.
- [6] Kairupan, S. B., & Siwij, D. S. (2023). Dinamika Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial di Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 112-125.
- [7] Tumbel, G. (2022). Analisis Hambatan Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik di Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(1), 45-58.
- [8] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- [9] Rizqia, A. N., & Purnaweni, H. (2016). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1-9.
- [10] Wrihatnolo, R. R., & Riant, N. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.